

UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL
DALAM PERSPEKTIF LIBERAL KLASIK

Anggryany Alamsyah

Dosen Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat & Politik

UIN Alauddin Makassar

Email: nanialamsyah@gmail.com

Abstrack

The preamble of Indonesian Fundamental Laws year 1945 stipulated that the independence of the Indonesian state was basically aimed "...to form a Government of the State of Indonesia that shall protect the whole people of Indonesia and the entire homeland of Indonesia, and in order to advance general prosperity, to develop the nation's intellectual life, and to contribute to the implementation of a world order based on freedom, lasting peace and social justice..." This part of the preamble means that every public policy in this country should always put hard efforts to reach those goals. Public policies that are not in line with the need of the citizens are apparently having no actual meaning for them. Those policies should be applicable and worthy for all aspects of their life. Laws number 25 year 2007 was passed with spirit "to create a conducive capital investment," while Laws number 25 year 2007 has explicitly showed that for our government, investment is everything; it is the only way to prosper Indonesian citizens. Clark has concluded that self-interested behavior motivates individuals and firms to compete in the free market. It also drives them to form groups and to seek government protection against competitive pressures and instable markets.

Key words: public policy, laws, capital, investment, government, behavior

Pendahuluan

Politik ekonomi adalah salah satu kajian dalam ilmu sosial. Istilah politik ekonomi pertama kali diperkenalkan tahun 1616 oleh penulis Perancis, Antoyne de Montchretien (1575-1621), dalam bukunya "*Treatise on Political*

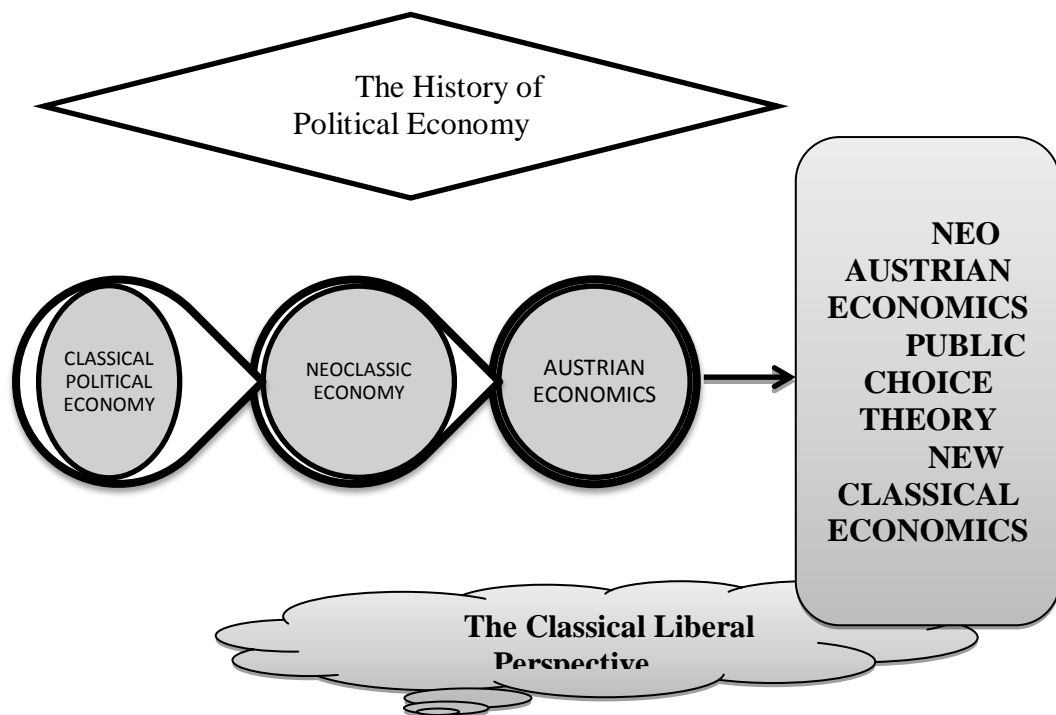
Economy". Istilah dalam bahasa Inggris pertama kali muncul tahun 1767 melalui publikasi Sir James Stuart (1712-1780) yang berjudul "*Inquiry into the Principles of Political Economy*". Para pakar politik ekonomi awal ini berusaha membuat pedoman dan menawarkan rekomendasi kebijakan bagi usaha pemerintah untuk menstimulasi pasar. Banyak perspektif yang bermunculan dari ilmu ini. Namun, Barry Clark membaginya ke dalam 4 perspektif yakni; "*Classical Liberal, Radical, Conservative, dan Modern Liberal*".¹

Adapun perspektif yang penulis gunakan disini adalah perspektif liberal klasik

yang berada diantara kuadran hirarkis dan individual. Walaupun bentuk awal pemikiran liberal sangatlah egaliter, di awal abad ke-19, para liberalis menyimpulkan bahwa pencapaian kebebasan individual berasal dari hirarki dan hirarki sangat penting bagi kekayaan ekonomi. Liberalisme klasik diartikulasikan di awal abad ke-19 oleh pakar ekonomi klasik dan belakangan diperkuat kembali oleh pakar ekonomi neo-klasik, khususnya aliran Austria (seperti terlihat pada bagan)²

¹Clark, Barry, *Political Economy: A Comparative Approach*, (London, Praeger Publisher, 1998), h.23

²*Ibid*, h.35-36



Dalam pandangan liberal klasik lebih lanjut, tulisan ini akan menganalisa keberadaan UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU ini awalnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, lalu menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Perspektif Liberal Klasik

Dari bagan di atas, terlihat dengan jelas bahwa politik ekonomi perspektif liberal klasik, mula-mula berawal dari politik ekonomi klasik, lalu ekonomi neo klasik, berlanjut ke ekonomi aliran Austria. Dimana ekonomi Austria ini terbagi 3 menjadi: *Neo Austrian Economics*, *Public Choice Theory* dan *New Classical Economics*.

Penganut politik ekonomi klasik sendiri menggabungkan optimisme dan pesimisme dalam visi mereka tentang ekonomi pasar. Optimisme berpusat pada antisipasi bahwa pasar akan menghasilkan kemakmuran dan kebebasan individual tanpa perlu pengawasan dari gereja atau negara. Dalam pengertian ini, politik ekonomi klasik dihubungkan dengan pencerahan, demonstrasi yang

ketika batasan agama dan politik dihilangkan, individu akan sejahtera dan masyarakat akan tetap teratur³.

Adam Smith (1723-1790), seorang professor filosofi moral berkebangsaan Scotlandia, dicengangkan oleh potensi pasar untuk meningkatkan kebebasan individual dan kekayaan materi. Walaupun dia bukan orang pertama yang mendorong kebijakan *laissez-faire* oleh pemerintah, bukunya *The Wealth of Nations* (1776) menyajikan kasus bagi kebebasan pasar dengan kearifan yang membentuk basis bagi politik ekonomi klasik. Aliran pemikiran bermunculan sejak 1776 hingga pertengahan abad ke-19 dan penyokongnya termasuk, selain Smith, Thomas Malthus (1766-1834), David Ricardo (1772-1823), Nassau Senior (1790-1864), and Jean Baptiste Say (1767-1832).

Adam Smith melihat kemunculan "*civil society*" sebagai hasil perilaku mencari profit dari pada sebagai sebuah rencana yang diketahui dan dilembagakan oleh proses politik atau otoritas publik. Transformasi dari "manusia yang ganas" menjadi masyarakat beradab, bagi Smith adalah karya teoritis kapitalisme. Namun, hal tersebut adalah konsekuensi yang tidak disengaja dari beragam tindakan yang semata-mata dilakukan untuk tujuan pribadi⁴

Mengabaikan prediksi kemiskinan dan akhir pertumbuhan, pendukung politik ekonomi klasik tetap berkomitmen pada *laissez-faire*. Masa depannya akan suram, tapi usaha pemerintah untuk turut campur hanya akan memperburuk situasi, karena pemerintah tidak dapat mengontrol kelangkaan lahan juga kecendrungan manusia untuk populasi yang berlebih. Pertolongan yang datang dari depopulasi disebabkan oleh wabah penyakit, kelaparan, dan perang, atau perdagangan dengan negara lain yang memiliki lahan yang melimpah dan makanan yang murah⁵.

Pendekatan klasik atas politik ekonomi merujuk kepada sebuah sistem pemuasan pribadi yang berasal dari agen-agen pribadi/swasta independen. Selama periode politik ekonomi klasik, beberapa istilah yang berbeda namun berhubungan, dipakai untuk sistem pemuasan kebutuhan ini, yakni: *civil society*, ekonomi pasar, masyarakat borjuis, kapitalisme, dan lain-lain.⁶

³*Ibid*, h.25

⁴Caporaso, A. James dan Levine, P. David, *Theories of Political Economy*, (Cambridge University Press; 1992) h.34

⁵ Clark, *Op.Cit*, h.25

⁶Caporaso, *Op.Cit*, h.36

Seiring dengan berjalannya waktu, kombinasi meningkatnya kekuatan kelas pekerja dan masalah sosial yang menyertai tuntutan baru atas intervensi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan, jaminan masa lalu, kesehatan publik, dan keamanan kerja. Menghadapi tekanan ini, kebijakan *laissez-faire* menjadi tidak populer.

Dengan buramnya masa depan kebijakan *laissez-faire* maka muncullah aliran baru yakni ekonomi neo-klasik. Penyokong ekonomi neo-klasik berusaha untuk mengkonstruksi sebuah teori yang sesuai dengan kekakuan ilmiah fisika. Untuk mencapai hal ini, mereka mengaplikasikan matematika sebagai metode analisa untuk menjelaskan pilihan konsumen dan produsen individual. Di bawah kondisi kompetisi yang sempurna, individu akan berada dalam pertukaran keuntungan yang saling menguntungkan sampai mereka memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari sumberdaya atas komando mereka – sebuah situasi yang dinamakan efisien oleh pakar ekonomi neoklasik⁷

Walaupun pakar ekonomi neoklasik berbagi nilai dan alat analisa yang sama, ketidaksetujuan diantara pakar ekonomi Austria dan England menimbulkan dua tradisi yang berbeda: *Austrian economics* dan *Cambridge economics*. Pakar penyokong *Austrian economists* tidak diragukan lagi, dipengaruhi oleh iklim politik di negara mereka di akhir abad ke-19. Ketika kerajaan Hapsburg remuk, kelas pekerja tumbuh menerima ide-ide sosialis. Dalam lingkungan ini, sekelompok pakar ekonomi di Vienna termasuk Carl Menger, Friedrich von Wieser (1851-1926), dan Eugen von Bohm-Bawerk (1851-1914) mendemonstrasikan kemunculan ekonomi pasar bebas tanpa intervensi pemerintah.

Liberalisme menunjuk kepada kebebasan dan hak individual melawan kesewenang-wenangan gereja, negara, dan orang lain. Komitmen ini terhadap kebebasan dan otonomi individual yang pada awalnya membuat liberal sangat egaliter dalam mendukung kesamaan hak bagi semua warga negara. Berbeda dengan struktur hirarkis dari masyarakat feodal, liberal mengantisipasi bahwa konsekuensi persamaan hak, secara substansial akan mendorong persamaan ekonomi yang lebih besar⁸

Liberalisme klasik yang diartikulasikan di awal abad ke-19 oleh pakar ekonomi klasik dan belakangan diperkuat kembali oleh pakar ekonomi neo-klasik, khususnya aliran Austria, menilai masyarakat sebagai kumpulan

⁷Clarck, *Op.Cit*, h.32

⁸ Clark, *Ibid*, h.33

individu otonom yang berusaha memenuhi kepentingan pribadinya. Idealnya, semua interaksi sosial hendaknya adalah pertukaran sukarela sesama orang dan setiap individu memiliki hak merdeka atas penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang.

Karena menyoroti pilihan individu sebagai determinan outcome sosial, liberalisme klasik sangat layak diekspresikan dalam bentuk teori ekonomi. Perkembangan historis Liberalisme Klasik erat kedudukannya dengan sejarah pemikiran ekonomi, dimulai dari ekonomi politik, sampai kepada ekonomi neo klasik Austria dan diakhiri dengan pemikiran antara lain ekonomi neo-Austria, ekonomi institusional baru, ekonomi konstitusional, libertarianisme, ekonomi sisi penawaran, dan teori hak milik.

Adapun prinsip-prinsip yang dianut oleh perspektif Liberal Klasik yang digambarkan Clark (1998) lebih lanjut sebagai berikut:

- (1) *Human nature*, manusia dipandang *self-interested* dan mampu bertindak otonom menggunakan kapasitasnya untuk alasan menemukan sarana paling efektif guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Sejalan dengan hal ini, Caporaso (1992) menyatakan bahwa istilah "*civil society*" sistem swasta yang tidak ingin diatur oleh keluarga ataupun negara, tapi sebuah sistem yang dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri, dalam mana "tiap anggota mengejar kepentingannya sendiri, semua hanyalah untuknya, yang dalam istilah Shlomo Avineri sebagai egoisme universal;
- (2) *Society*, Society atau masyarakat adalah agregasi individu dan tidak punya sasaran atau tujuan sendiri. Masyarakat yang baik adalah yang membolehkan individu memenuhi kepentingan pribadinya dan bebas dari batasan-batasan yang sewenang-wenang;

(3) *Government*, Individu ciptakan pemerintah untuk tujuan perlindungan hak yang diatur dalam undang-undang. Diluar fungsi ini, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang sedikit bekerja. Sejalan dengan hal ini dalam Caporaso (1992) dikatakan, dengan membiarkan keputusan ada pada pengarah arus pekerja dan modal ditangan individu (kapitalis), kita mengizinkan keuntungan untuk menentukan perkembangan industri. Kapitalis adalah agen, dan bukan kekuatan pengarah. Tentu saja, tidak ada individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk mengarahkan perkembangan ekonomi. Perhatian pada investasi saluran keuntungan dalam cara yang paling menguntungkan secara social. Memastikan bahwa pendapat